BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari skripsi ini adalah bahwa hak asuh anak (hadhanah) bagi anak yang belum mumayyiz, atau anak di bawah umur, secara mutlak diutamakan kepada ibu. Hal ini sejalan dengan prinsip yang ada dalam hukum Islam, khususnya Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menempatkan ibu sebagai pihak yang lebih layak untuk mengasuh anak di usia tersebut. Ibu dianggap memiliki kemampuan lebih dalam memberikan kasih sayang, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Meskipun demikian, keputusan ini tetap mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kesehatan mental, fisik, dan moralitas dari orang tua, yang dapat mempengaruhi keputusan akhir dalam kasus pengasuhan anak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan, hak asuh anak di bawah umur lebih diutamakan untuk ibu, kecuali terdapat alasan kuat untuk memindahkan hak tersebut kepada ayah. Alasan-alasan seperti ketidakmampuan ibu secara moral, fisik, atau ekonomi menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ibu sebagai pemegang hak asuh anak meliputi mekanisme banding, kasasi, dan pelaporan ke pihak berwajib apabila terjadi pelanggaran terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, ibu dapat mengajukan gugatan ulang apabila terdapat perubahan signifikan dalam kondisi pihak yang memegang hak asuh anak, seperti ketidakmampuan ekonomi atau faktor lain yang dapat mengancam kesejahteraan anak. Penerapan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) menjadi landasan penting dalam penyelesaian sengketa hak asuh. Namun, lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan di tingkat lapangan sering kali menjadi hambatan yang menciptakan ketidakadilan bagi pihak ibu, seperti yang terjadi dalam kasus TM. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas utama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat direkomendasikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Pengadilan

Pengadilan sebaiknya memperkuat mekanisme eksekusi putusan hak asuh anak, termasuk melibatkan pihak kepolisian atau mediator profesional untuk memastikan pelaksanaan putusan berjalan sesuai hukum. Dalam proses persidangan, pengadilan disarankan untuk melibatkan ahli psikologi anak guna memberikan evaluasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi emosional dan kebutuhan psikologis anak. Selain itu, sistem administrasi hukum harus diperbaiki, termasuk memastikan kelengkapan surat kuasa dan dokumen pendukung lainnya, agar proses hukum tidak terganggu oleh kesalahan administratif.

Lebih lanjut, pengadilan perlu melakukan interpretasi lebih fleksibel terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar penerapan prinsip ini dapat diintegrasikan secara lebih konkret dalam sistem hukum Islam. Hal ini penting mengingat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bersifat mengikat sering kali tidak mampu mencerminkan fakta lapangan.

2. Bagi Masyarakat, khususnya orang tua yang melakukan perceraian

Orang tua yang bercerai diharapkan lebih mengutamakan kepentingan anak daripada konflik pribadi, dengan menjaga komunikasi yang baik untuk memastikan anak tetap mendapatkan pengasuhan yang optimal. Ibu dan ayah harus memahami pentingnya menjaga stabilitas emosional anak pasca perceraian dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, baik di rumah maupun dalam hubungan sosial anak. Orang tua juga perlu menjunjung tinggi kepatuhan terhadap putusan pengadilan untuk menghindari konflik lanjutan yang dapat merugikan anak secara emosional dan psikologis. Kemudian, edukasi hukum bagi masyarakat harus ditingkatkan agar orang tua memahami hak dan kewajiban mereka dalam mengasuh anak setelah perceraian, serta cara mengajukan upaya hukum bila diperlukan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian yang akan dilakukan, diharapkan melakukan studi empiris tentang dampak keputusan hukum terhadap anak dalam sengketa hak asuh perlu dilakukan, dengan melibatkan wawancara atau survei kepada anak-anak yang terlibat. Penelitian ke depan juga sebaiknya fokus pada pengaruh mediasi keluarga sebagai alternatif penyelesaian konflik hak asuh anak dapat menjadi topik yang relevan untuk membantu mengurangi konflik yang berlarut-larut.